



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 400, 2021

KEMENDAGRI. Kab. Bone. Kab. Sinjai. Prov.
Sulsel. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BONE DENGAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
2. Kabupaten Bone adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Sinjai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. Muara Salo Tangka yang ditandai oleh PABU 01 dengan koordinat $05^{\circ} 06' 51.074''$ LS dan $120^{\circ} 17' 17.886''$ BT yang terletak di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang berbatasan dengan Desa Massangkae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- b. PABU 01 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 02 dengan koordinat $05^{\circ} 06' 06.254''$ LS dan $120^{\circ} 16' 03.161''$ BT yang terletak di Desa Massangkae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- c. PABU 02 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 03 dengan koordinat $05^{\circ} 06' 58.013''$ LS dan $120^{\circ} 15' 40.685''$ BT yang terletak di Desa Massangkae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- d. PABU 03 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 04 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 43.117''$ LS dan $120^{\circ} 15' 00.255''$ BT yang terletak di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- e. PABU 04 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 05 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 32.753''$ LS dan $120^{\circ} 14' 40.542''$ BT yang terletak di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang berbatasan dengan Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- f. PABU 05 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 06 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 17.734''$ LS dan $120^{\circ} 13' 57.360''$ BT yang terletak di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara

- Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- g. PABU 06 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 07 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 57.942''$ LS dan $120^{\circ} 12' 57.364''$ BT yang terletak di Desa Abbumpungeng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Kelurahan Lamatti Rilau Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
 - h. PABU 07 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 08 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 40.655''$ LS dan $120^{\circ} 12' 01.833''$ BT yang terletak di Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang berbatasan dengan Desa Abbumpungeng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
 - i. PABU 08 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 09 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 40.638''$ LS dan $120^{\circ} 11' 31.696''$ BT yang terletak di Desa Raja Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
 - j. PABU 09 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 10 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 11.406''$ LS dan $120^{\circ} 10' 49.554''$ BT yang terletak di Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang berbatasan dengan Desa Raja Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
 - k. PABU 10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada PABU 11 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 37.528''$ LS dan $120^{\circ} 09' 50.627''$ BT yang terletak di Desa Raja Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone yang berbatasan dengan Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
 - l. PABU 11 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada TK 01 dengan koordinat $05^{\circ} 02' 41.630''$ LS dan $120^{\circ} 07' 32.165''$ BT;

- m. TK 01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Salo Tangka sampai pada TK 02 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 24.018''$ LS dan $120^{\circ} 03' 38.947''$ BT;
- n. TK 02 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Salo sampai pada TK 03 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 30.000''$ LS dan $120^{\circ} 03' 26.281''$ BT;
- o. TK 03 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Salo sampai pada TK 04 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 41.618''$ LS dan $120^{\circ} 02' 39.425''$ BT;
- p. TK 04 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Salo sampai pada TK 05 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 51.118''$ LS dan $120^{\circ} 01' 13.595''$ BT;
- q. TK 05 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 06 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 17.080''$ LS dan $120^{\circ} 00' 45.342''$ BT;
- r. TK 06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 07 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 49.387''$ LS dan $120^{\circ} 00' 04.881''$ BT;
- s. TK 07 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Salo sampai pada TK 08 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 42.393''$ LS dan $119^{\circ} 59' 19.559''$ BT;
- t. TK 08 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 09 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 22.490''$ LS dan $119^{\circ} 58' 58.768''$ BT; dan
- u. TK 09 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa yang ditandai oleh TK 10 dengan koordinat $05^{\circ} 08' 21.527''$ LS dan $119^{\circ} 58' 14.614''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

